

**KELAYAKAN PROGRAM HUTAN DESA DI DESA TANJUNG AUR II
KECAMATAN PINO RAYA KABUPATEN BENGKULU SELATAN**
*(The Feasibility of Village Forest Program in Tanjung Aur II Village, Pino Raya
Subdistrict, South Bengkulu Regency)*

Desmantoro¹, Nurheni Wijayanto² & Leti Sundawati³

¹Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kahayan, Direktorat Jenderal PDASHL,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jl. RTA. Milono Km. 2,5 Palangka Raya 73111, Indonesia
E-mail: torro_23@yahoo.co.id

²Departemen Silvikultur Fahutan IPB, Kampus IPB Dramaga PO BOX 168, Bogor, 16680, Indonesia;
E-mail: nurheniw@gmail.com

³Departemen Manajemen Hutan Fahutan IPB, Kampus IPB Dramaga PO BOX 168, Bogor, 16680, Indonesia;
E-mail: lsundawati@gmail.com

Diterima 13 Agustus 2015, direvisi 18 Juli 2016, disetujui 26 Juli 2016

ABSTRACT

A feasibility study toward the prerequisite conditions is required for the successful implementation of the Village Forest program in Tanjung Aur II Village. This study aims to: 1) identify bio-geophysical conditions of the work area; 2) analyze the conditions of socio-economic-cultural society/ institutional; 3) analyze the support of stakeholders; and 4) formulate appropriate implementation strategies. The study was using survey method and qualitative studies with multiple analysis techniques. The results showed that: 1) the biogeophysical conditions was eligible and suitable to be proposed as village forest working area; 2) conditions of socio-economic-cultural communities enable to form village forest management institution, through collaboration between state forest encroachers and the villager representatives; 3) stakeholders were ready to provide support facilitation and assistance according to their capacity and capabilities. Key stakeholder were among others BPDAS Ketahun, Dishut Provinsi Bengkulu, Dishut ESDM Bengkulu Selatan, NGOs Ulayat, and officials of the Village; 4) the implementation strategy of village forest program that suitable for Tanjung Aur II was a competitive strategy or diversification (S-T strategy), with the main priority of the strategy, among others by seeking and asking for support from relevant stakeholders or other parties who had capacity and capability to undertake facilitation and assistance.

Keywords: Village forest; feasibility; strategies; implementation.

ABSTRAK

Studi kelayakan terhadap kondisi prasyarat perlu dilakukan untuk keberhasilan implementasi program Hutan Desa, termasuk di wilayah Desa Tanjung Aur II. Penelitian ini bertujuan: 1) mengidentifikasi kondisi biogeofisik/persyaratan areal kerja; 2) menganalisis kondisi sosial ekonomi budaya masyarakat/persyaratan kelembagaan; 3) menganalisis dukungan *stakeholder*; dan 4) memformulasikan strategi implemementasi yang sesuai. Penelitian menggunakan metode survei dan kajian kualitatif dengan multi teknik analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Areal hutan negara di Desa Tanjung Aur II memenuhi persyaratan dan layak diusulkan sebagai areal kerja Hutan Desa; 2) Kondisi sosial ekonomi budaya masyarakat di wilayah Desa Tanjung Aur II memungkinkan untuk membentuk lembaga pengelola Hutan Desa, melalui kolaborasi masyarakat perambah hutan negara dan perwakilan masyarakat Desa Tanjung Aur II; 3) *Stakeholder* siap memberikan dukungan fasilitasi dan pendampingan sesuai kapasitas dan kapabilitasnya masing-masing. *Stakeholder* kunci adalah BPDAS Ketahun, Dishut Provinsi Bengkulu, Dishut ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan, LSM Ulayat, dan Aparatur Desa Tanjung Aur II; 4) Strategi implementasi program Hutan Desa yang sesuai bagi Desa Tanjung Aur II adalah strategi kompetitif atau diversifikasi (strategi S-T), dengan strategi prioritas utama adalah mencari dan meminta dukungan dari *stakeholder* terkait ataupun pihak-pihak lainnya yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk melakukan fasilitasi dan pendampingan.

Kata kunci: Hutan desa; kelayakan; strategi; implementasi.

I. PENDAHULUAN

Hutan merupakan suatu ekosistem sosial politik yang merupakan arena bagi berbagai kepentingan sumber daya alam (Cahyono, 2012). Kompleksitas kepentingan banyak pihak, termasuk masyarakat dapat memicu lahirnya konflik sosial antar pihak yang berkepentingan dalam penguasaan hutan. Konflik penguasaan hutan tidak hanya menimbulkan kerusakan sumber daya alam, tetapi juga merusak relasi antar manusia dan hancurnya tatanan sosial (Maring, 2013). Permasalahan ini tidak dapat diatasi dengan meniadakan komponen yang dianggap mengancam (masyarakat), tetapi dapat diantisipasi dengan cara memperbaiki dan membangun hutan bersama-sama (pemerintah dan masyarakat) agar hutan menjadi tetap lestari dan bermanfaat (Sumanto, 2009).

Kerusakan hutan tidak mungkin dapat dihentikan tanpa dibangunnya kondisi yang memungkinkan tumbuhnya kepedulian masyarakat terhadap hutan. Keterlibatan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan merupakan suatu keharusan, sehingga cara alternatif yang dapat dipilih oleh pemerintah adalah dengan menggulirkan kebijakan-kebijakan pengelolaan hutan berbasis masyarakat (Kartodihardjo, 2007). Kebijakan-kebijakan pengelolaan hutan berbasis masyarakat ini dimanifestasikan dalam bentuk program-program perhutanan sosial. Perhutanan sosial merupakan konsep yang telah diterima dan diakui sebagai salah satu pendekatan yang baik dalam rangka mencapai kelestarian hutan dan memberikan berbagai manfaat positif bagi masyarakat, termasuk juga masyarakat di luar wilayah program (Borrini-Feyerabend, 2003; Brunner, Seymour, & Badenoch, 1999; Lacuna-Richman, 2012).

Salah satu program perhutanan sosial yang digagas oleh pemerintah adalah Hutan Desa. Hutan Desa didefinisikan sebagai hutan negara yang belum dibebani izin/hak, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa (Dephut, 2007; Dephutbun, 1999; Wiyono & Santoso, 2009). Penyelenggaraan hutan desa dimaksudkan untuk memberikan akses kepada masyarakat desa melalui lembaga desa dalam memanfaatkan sumber daya hutan secara lestari serta bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Kemenhut, 2014).

Implementasi program Hutan Desa belum berjalan efektif yang tercermin dari tidak

tercapainya target nasional penetapan areal kerja Hutan Desa periode 2010–2014 sebesar 500.000 hektar (Kemitraan, 2011; Prasetyo, 2013). Sejak tahun 2008 hingga akhir tahun 2014 baru 397 desa yang mengusulkan penetapan areal kerja Hutan Desa, 223 desa telah mendapatkan penetapan dengan luas total \pm 318.024 hektar, dan 32 desa di antaranya sudah mendapatkan hak pengelolaan Hutan Desa (Dit BPS Kemenhut, 2015). Minimnya data-data kondisi biogeofisik dan sosial ekonomi budaya (sosekbud) desa, kurangnya dukungan *stakeholder*, serta belum terumuskannya strategi implementasi yang tepat menjadi hal mendasar penyebab belum efektifnya pelaksanaan program Hutan Desa ini.

Desa Tanjung Aur II di Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan salah satu potret nyata desa hutan yang menggambarkan ketiga persoalan pokok kehutanan (ekologi, ekonomi, sosial dan budaya). Desa ini juga belum pernah tersentuh program perhutanan sosial, termasuk program Hutan Desa. Kawasan hutan negara di desa ini memiliki fungsi strategis sebagai pengatur sistem tata air dan penyangga bagi wilayah-wilayah lainnya dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Pino. Namun, sebagian areal hutan negara tersebut dirambah dan dikonversi menjadi lahan pertanian atau perkebunan oleh masyarakat.

Berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh instansi yang membidangi kehutanan di Kabupaten Bengkulu Selatan menyebabkan upaya-upaya perlindungan dan pengamanan kawasan hutan dari ancaman perambahan cukup sulit untuk dilaksanakan secara intensif. Ancaman perambahan ini sangat mungkin akan meluas, mengingat 58,6% penduduk usia kerja yang bekerja di Kabupaten Bengkulu Selatan lapangan pekerjaan utamanya adalah di sektor pertanian dan membutuhkan lahan untuk aktivitas budi daya (BPS Kab BS, 2013).

Kondisi ini memerlukan penanganan yang cepat dan tepat, salah satunya adalah dengan mengimplementasikan program perhutanan sosial Hutan Desa. Program Hutan Desa merupakan salah satu skema perhutanan sosial yang dapat menjadi solusi alternatif bagi permasalahan pengelolaan sumber daya hutan negara di Desa Tanjung Aur II. Persyaratan utama yang harus dipenuhi dalam implementasi program Hutan Desa adalah ketersediaan areal kerja, lembaga pengelola, serta dukungan fasilitasi dan pendam-

pingan. Ketiga persyaratan ini perlu dikaji terlebih dahulu dengan mengidentifikasi serta menganalisis kondisi biogeofisik, sosial-ekonomi-budaya (sosekbud), dan dukungan *stakeholder* terkait. Dari hasil analisis tersebut akan diketahui kelayakan program ini untuk diimplementasikan di Desa Tanjung Aur II.

Langkah selanjutnya adalah merumuskan strategi yang sesuai bagi implementasi program Hutan Desa di wilayah Desa Tanjung Aur II. Dengan adanya strategi implementasi yang baik, diharapkan program Hutan Desa di Desa Tanjung Aur II dapat terlaksana dengan baik. Program Hutan Desa yang dapat diimplementasikan dengan baik akan mampu menjamin kelestarian hutan, meningkatkan kesejahteraan, dan mencegah terjadinya konflik pemanfaatan sumber daya hutan.

Pertanyaan penelitian di dalam studi ini, adalah: 1) apakah kondisi biogeofisik kawasan hutan di Desa Tanjung Aur II memenuhi persyaratan areal kerja Hutan Desa?; 2) apakah kondisi sosekbud masyarakat di Desa Tanjung Aur II memungkinkan untuk membentuk lembaga pengelola Hutan Desa?; 3) bagaimana potensi dukungan fasilitasi dan pendampingan *stakeholder* terhadap implementasi program Hutan Desa di wilayah Desa Tanjung Aur II?; dan 4) bagaimana strategi yang sesuai bagi implementasi program Hutan Desa di wilayah Desa Tanjung Aur II?

Dalam rangka menjawab rumusan masalah penelitian di atas, dilakukan serangkaian penelitian dengan tujuan: 1) mengidentifikasi kondisi biogeofisik kawasan hutan di Desa Tanjung Aur II

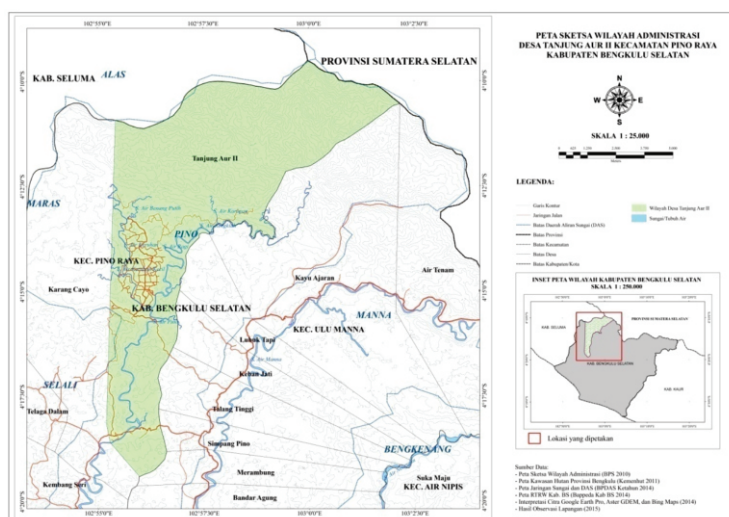
yang terkait dengan persyaratan areal kerja Hutan Desa; 2) menganalisis kondisi sosekbud masyarakat di Desa Tanjung Aur II yang terkait dengan persyaratan kelembagaan Hutan Desa; 3) meng-analisis dukungan *stakeholder* yang terkait dengan fasilitasi dan pendampingan dalam implementasi program Hutan Desa; dan 4) memformulasikan strategi yang sesuai bagi implementasi program Hutan Desa di wilayah Desa Tanjung Aur II.

II. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian berada di Desa Tanjung Aur II, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu (Gambar 1). Penelitian dilaksanakan selama 6 (enam) bulan, mulai bulan Februari 2015 hingga bulan Juli 2015.

Penelitian ini menggunakan metode survei dan kajian kualitatif (Singarimbun *et al.*, 2006; Sugiyono, 2009; Sugiyono, 2013). Variabel penelitian, data, metode pengumpulan dan analisis data sebagaimana tertera dalam rincian tahapan penelitian (Lampiran 1).

Responden/informan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: (1) responden masyarakat; (2) responden *stakeholder/ key informan*; dan (3) responden ahli (*expert*). Penarikan responden/informan penelitian menggunakan metode *non-probability sampling* secara *snowball* dengan *quota controll* untuk memilih responden/informan kelompok pertama dan kedua, dan secara *purposive* untuk kelompok



Sumber (*Source*): Hasil olahan data spasial (*Processed results of spatial data*)

Gambar 1. Peta lokasi penelitian
Figure 1. Research location map

Populasi penelitian kelompok pertama adalah seluruh kepala keluarga (KK) yang berinteraksi langsung dengan hutan negara di wilayah Desa Tanjung Aur II yang berjumlah \pm 169 KK. Jumlah responden sebanyak 47 orang KK (27,8%) ditentukan dengan menggunakan nomogram Harry King pada taraf kepercayaan 90%.

Responden kelompok kedua disebut juga informan kunci (*key informan*), terdiri dari orang atau individu bagian dari *stakeholder* yang memahami dan/atau terkait dengan rencana implementasi program Hutan Desa di Desa Tanjung Aur II. Jumlah responden sebanyak 15 orang, yang terdiri dari: Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Ketahun (2 orang); Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Bengkulu (2 orang); Dishut Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan (2 orang); Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bengkulu Selatan (2 orang); Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Selatan (1 orang); PT Jatropha Solutions (1 orang); Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Ulayat Bengkulu (1 orang); Jurusan Kehutanan Universitas Bengkulu (1 orang); Aparatur Desa Tanjung Aur II (3 orang).

Responden kelompok ketiga, responden pakar (*expert respondent*) dipilih secara *purposive* dari responden *stakeholder/key informan*. Jumlah responden sebanyak tujuh orang yang terdiri dari: BPDAS Ketahun (2 orang); Dishut Provinsi Bengkulu (1 orang); Dishut ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan (1 orang); LSM Ulayat Bengkulu (1 orang); dan Aparatur Desa Tanjung Aur II (2 orang).

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, meliputi: analisis komponen biogeofisik, analisis komponen sosekbud, analisis *stakeholder*, analisis faktor internal dan eksternal, analisis alternatif strategi, dan analisis prioritas strategi. Analisis data menggunakan metode analisis yang relevan dengan komponen data yang dianalisis.

1. Analisis Komponen Biogeofisik

Data-data yang terkait dengan biogeofisik dan mengandung informasi keruangan (spasial) dianalisis dengan metode *overlay* (tumpang susun) yang biasa digunakan dalam analisis spasial (Prasetyo, 2011). Data-data yang berisi informasi spasial baik data primer (hasil observasi dan

pengambilan data langsung di lapangan menggunakan *Global Positioning System* (GPS)) maupun data sekunder (data spasial administrasi wilayah, kawasan hutan, jaringan sungai dan Daerah Aliran Sungai (DAS), jaringan jalan, perijinan lahan dan hutan, olahan citra *aster GDEM, bing maps, dan google earth*) dijadikan *input* (masukan). Selanjutnya, data-data tersebut diproses menggunakan teknik *overlay* (tumpang susun) dan diolah dengan fitur-fitur *editing* yang sesuai menggunakan software *ArcGIS 9.3* yang dilengkapi *extension tools* yang diperlukan. Setelah itu, dilakukan proses *layout* sehingga dihasilkan peta-peta tematik yang berisikan data dan informasi spasial yang bermanfaat dalam penentuan Areal Kerja Hutan Desa. Data-data komponen biogeofisik non spasial lainnya dianalisis secara deskriptif.

2. Analisis Komponen Sosekbud

Data-data komponen sosekbud masyarakat, termasuk juga persepsi dianalisis secara deskriptif kualitatif. Data dideskripsikan dalam bentuk tabel, grafik, dan gambar yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif yang dipakai adalah metode Miles & Huberman (1994). Menurut metode ini, analisis data dilakukan dengan melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan melalui penggambaran atau verifikasi.

Modal sosial masyarakat penggarap lahan hutan negara dianalisis dengan menggunakan metode *Social Capital Integrated Questionnaire (SC-IQ)* yang dikembangkan oleh Grootaert, Narayan, Jones, & Woolcock (2004). Model ini kemudian dimodifikasi dan disesuaikan dengan kondisi lokasi dan tujuan penelitian. Modal sosial yang diukur meliputi (1) tingkat kepercayaan, (2) tingkat pengetahuan dan penerapan norma/aturan setempat, dan (3) kerja sama dan jaringan.

3. Analisis Stakeholder

Analisis *stakeholder* menggunakan metode analisis kategori kombinasi (Febriani, 2012) dengan mengklasifikasikan *stakeholder* berdasarkan: (1) kepentingan, (2) pengaruh dan (3) kekuatan mereka dalam implementasi program Hutan Desa. Metode ini dikembangkan dari metode analisis kategori berdasarkan tingkat kepentingan dan

pengaruh (Reed *et al.*, 2009) dan analisis kategori berdasarkan tingkat kekuatan dan pengaruh (Silverstein, Samuel, & DeCarlo, 2009).

4. Analisis Faktor Internal dan Eksternal

Analisis faktor internal dilakukan untuk mengetahui faktor kekuatan yang dapat dimanfaatkan dan faktor kelemahan yang harus diatasi. Faktor-faktor ini dianalisis dengan menggunakan Matrik *Internal Factor Evaluation* (IFE). Analisis faktor eksternal dilakukan untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman yang mungkin ada. Faktor-faktor eksternal dianalisis menggunakan Matrik *Eksternal Factor Evaluation* (EFE) (David, 2009; Rangkuti, 1997).

5. Analisis Alternatif Strategi

Penyusunan strategi pembangunan pedesaan, termasuk di bidang kehutanan dapat menggunakan metode analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) (Adisasmita, 2006). Analisis SWOT dilakukan dengan menyusun kemungkinan-kemungkinan kombinasi faktor internal dengan faktor eksternal dalam sebuah matrik.

6. Analisis Prioritas Strategi

Penentuan prioritas strategi menggunakan metode analisis *Quantitative Strategic Planning Matrix* (QSPM) atau matrik perencanaan stratejik kuantitatif (David, 2009). Analisis QSPM dilakukan dengan membuat Matrik QSP dengan input faktor-faktor internal dan eksternal dan pilihan alternatif strategi yang sebelumnya telah ditentukan dengan menggunakan analisis SWOT. Bobot pada masing-masing faktor dikalikan dengan skor daya tarik (*Attractiveness Score/AT*) sehingga diperoleh total skor daya tarik (*Total Attractiveness Score/TAS*). Besar kecilnya TAS menentukan urutan prioritas strategi. Alternatif strategi dengan nilai TAS tertinggi adalah strategi yang paling diprioritaskan untuk direkomendasikan dalam implementasi program Hutan Desa.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Biogeofisik Kawasan Hutan

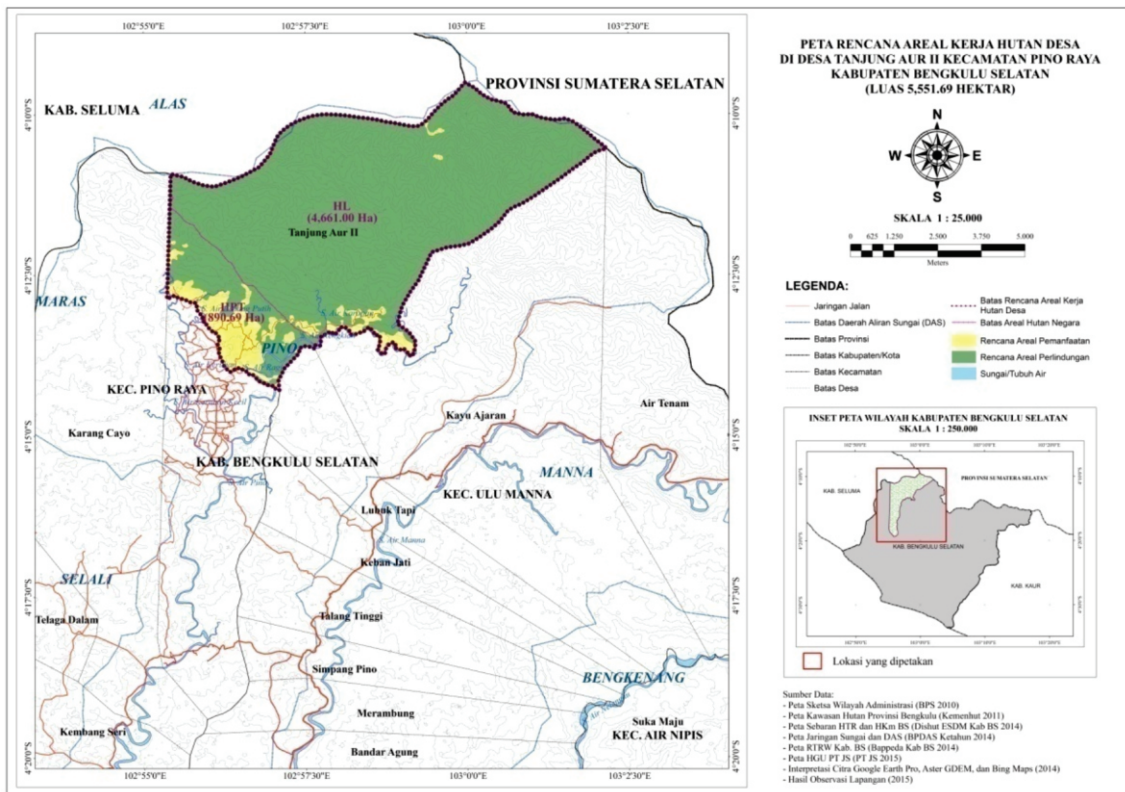
Desa Tanjung Aur II dengan luas wilayah \pm 8.369,09 ha memiliki kawasan hutan negara seluas 5.589,27 ha (66,78% wilayah desa) dengan fungsi

lindung (4.667,87 ha) dan fungsi produksi terbatas (921,40 ha) (BPS, 2010). Tutupan lahan kawasan hutan negara terbagi menjadi hutan primer campuran (5.068,43 ha), hutan sekunder campuran (48,17 ha), kebun campuran (434,70 ha), dan tubuh air (37,96 ha). Kawasan hutan negara di wilayah Desa Tanjung Aur II secara umum berada dalam kelas kelerengan agak curam (16–25%) hingga curam (25–40%) dengan ketinggian berkisar 100–1.250 mdpl. Aksesibilitas menuju lokasi hutan negara ditempuh melalui jalur darat berupa jalan tanah yang sebagiannya telah diperkeras serta menyeberangi dua sungai, yaitu Sungai Air Pino dan Sungai Air Keruhan. Perjalanan menuju lokasi dapat ditempuh dengan mengendarai mobil, sepeda motor, atau berjalan kaki. Jika mengendarai sepeda motor, maka untuk menyeberangi sungai Air Pino harus menaiki rakit penyeberangan. Jarak tempuh dari pemukiman desa terdekat \pm 9,5 km dengan waktu tempuh 20-30 menit menggunakan sepeda motor.

Dari hasil observasi lapangan dan wawancara dengan responden/informan diketahui bahwa kawasan hutan negara di wilayah Desa Tanjung Aur II memiliki potensi dan layak untuk diusulkan sebagai calon areal kerja Hutan Desa. Hasil identifikasi kelayakan variabel biogeofisik calon areal kerja Hutan Desa di Desa Tanjung Aur II ditampilkan dalam Lampiran 2.

Kawasan hutan negara di Desa Tanjung Aur II, baik Hutan Lindung (HL) maupun Hutan Produksi Terbatas (HPT), secara keseluruhan layak untuk diusulkan sebagai calon areal kerja Hutan Desa. Kawasan hutan yang tutupannya masih berupa hutan primer dapat dijadikan areal perlindungan, sedangkan kawasan hutan berupa kebun dan hutan sekunder dapat dijadikan areal pemanfaatan. Rencana areal kerja Hutan Desa di Desa Tanjung Aur II sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 2.

Sumber daya utama yang dapat dimanfaatkan adalah lahan, terutama lahan-lahan hutan negara yang telah digarap oleh petani perambah. Hasil penelitian Gautama (2007) menyebutkan bahwa luas lahan merupakan salah satu faktor produksi yang penting yang memengaruhi kegiatan usaha tani. Ukuran luas lahan yang dikelola turut menentukan tinggi rendahnya pendapatan yang diperoleh. Pemanfaatan lahan hutan untuk budi daya tanaman pertanian atau perkebunan dapat



Sumber (Source): Hasil olahan data spasial (Processed results of spatial data).

Gambar 2. Peta rencana areal kerja Hutan Desa di Desa Tanjung Aur II
Figure 2. Map of Village Forest working area plan in the Village of Tanjung Aur II

dioptimalkan dengan menggunakan sistem agroforestri secara intensif. Penerapan sistem agroforestri merupakan salah satu solusi untuk mengurangi tekanan terhadap hutan dan mengatasi masalah kebutuhan lahan pertanian atau perkebunan. Hasil penelitian Premono & Lestari (2013) di Kabupaten Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah menunjukkan bahwa pola penanaman dengan sistem agroforestri yang dikembangkan oleh masyarakat layak secara finansial.

Kawasan hutan negara di Desa Tanjung Aur II, baik yang sudah dibuka menjadi kebun maupun yang memiliki tutupan hutan yang masih bagus dapat dikelola lebih lanjut untuk aktivitas wisata alam seperti *camping*, *off-road*, dan *hiking*. Pemanfaatan jasa lingkungan seperti air bersih dan udara bersih pun cukup potensial untuk dilakukan di kawasan hutan negara di wilayah Desa Tanjung Aur II ini. Dari sisi potensi kayunya, kawasan hutan negara di wilayah Desa Tanjung Aur II, khususnya kawasan HPT memiliki potensi tegakan kayu yang dapat dimanfaatkan secara terbatas. Jenis-jenis kayu yang terdapat di areal HPT tersebut antara lain

kruing, meranti, kayu balam, kayu lulus, pulai, jelutung bukit, kayu hitam, kayu terap, durian, dan lain-lain. Untuk potensi hasil hutan bukan kayu, di areal HPT terdapat beberapa jenis rotan, pohon penghasil buah dan getah, serta pohon tempat lebah bersarang.

B. Sosekbud Masyarakat yang Berinteraksi dengan Hutan

Kegiatan inventarisasi yang dilakukan oleh Dishut ESDM Bengkulu Selatan bersama peneliti berhasil mendata 169 KK yang melakukan aktivitas perambahan di kawasan hutan negara Desa Tanjung Aur II. Aktivitas perambahan telah berlangsung sejak tahun 2006 dengan luas garapan per KK berkisar 1 hingga 6 hektar. Total luas lahan garapan mencapai $\pm 434,70$ hektar. Hampir keseluruhan KK tersebut adalah masyarakat dari luar Desa Tanjung Aur II. Tuntutan pemenuhan kebutuhan ekonomi menjadi motivasi masyarakat ini untuk bertani atau berkebun di hutan negara tersebut. Ketidak-mampuan untuk membeli lahan

di daerah asal domisili menjadi alasan mereka membuka hutan negara yang cukup jauh dari domisili mereka. Hasil penelitian Subarna (2011) menunjukkan bahwa ada hubungan yang nyata antara luas areal perambahan dengan tekanan ekonomi.

Rerata tingkat pendapatan kepala keluarga petani penggarap lahan hutan negara di Desa Tanjung Aur II berkisar Rp 9.000.000 hingga Rp 78.175.000 per tahun. Pendapatan tersebut sepenuhnya bersumber dari usaha tani atau kebun di lahan hutan negara. Pemasaran hasil-hasil panen/produksi melalui tokeh atau pedagang pengumpul di luar Desa Tanjung Aur II. Angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) keluarga berkisar Rp 12.470.000 hingga Rp 71.870.000 per tahun. Sebanyak 22 KK responden (46,81%) belum mampu memenuhi KHL sebagaimana mestinya.

Masyarakat penggarap lahan hutan negara di Desa Tanjung Aur II memiliki modal sosial yang tinggi (Tabel 1). Petani penggarap lahan hutan negara ini menganggap satu sama lainnya sebagai keluarga. Mereka terhubung ikatan emosional rasa senasib dan sepenanggungan yang membuat mereka mau saling membantu dan peduli satu sama lain. Kelembagaan kelompok terbentuk berdasarkan saran dari Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan. Pengelompokan dilakukan berdasarkan lokasi kebun (*talang*) dan/atau daerah asal perambah. Kelompok yang terbentuk yaitu: 1) Kelompok Talang Air Benang Putih, 2) Kelompok Talang Air Ragi, 3) Kelompok Talang Air Karapan, dan 4) Kelompok Talang Kedurang Maras. Masing-masing kelompok

menunjuk seorang koordinator yang berfungsi sebagai pemimpin komunitas, penghubung antar kelompok, serta penghubung kelompok dengan pihak Desa Tanjung Aur II dan instansi terkait. Kelompok-kelompok ini yang akan dipersiapkan untuk menjadi lembaga pengelola Hutan Desa. Dalam pelaksanaannya, kelompok harus berkolaborasi dengan perangkat dan perwakilan masyarakat Desa Tanjung Aur II.

Kelembagaan lokal yang kuat merupakan syarat utama untuk keberlanjutan program, tidak terkecuali Hutan Desa (Sahide, 2011). Anantanyu (2011) menjelaskan bahwa kelembagaan pertanian memiliki peran dan kontribusi dalam akselerasi pengembangan sosial ekonomi petani; aksesibilitas pada informasi pertanian; aksesibilitas pada modal, infrastruktur, pasar; dan adopsi inovasi pertanian. Keberadaan kelembagaan petani juga akan memudahkan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam memfasilitasi dan memberikan penguatan pada petani.

Tingkat pengetahuan masyarakat penggarap lahan hutan negara di Desa Tanjung Aur II terhadap program Hutan Desa masih rendah. Meskipun demikian, mereka memiliki persepsi yang baik terhadap program Hutan Desa. Penjelasan dan diskusi bersama peneliti mengenai program ini telah memberikan keyakinan kepada masyarakat penggarap lahan hutan negara bahwa program Hutan Desa bermanfaat dan penting bagi mereka dan Desa Tanjung Aur II. Masyarakat juga meyakini bahwa program Hutan Desa dapat diimplementasikan di Desa Tanjung Aur II dengan dukungan dari semua pihak yang terkait.

Tabel 1. Akumulasi modal sosial masyarakat perambah hutan negara di Desa Tanjung Aur II
Table 1. The accumulation of social capital of encroachers community in state forest in Tanjung Aur II

No.	Modal sosial (<i>Social capital</i>)	Nilai (<i>Score</i>)	Kategori (<i>Category</i>)
1.	Tingkat kepercayaan masyarakat (<i>Level of community trust</i>)	755	Tinggi (<i>High</i>)
2.	Tingkat pengetahuan dan penerapan norma/aturan setempat (<i>Level of knowledge and application of local norms/rules</i>)	237	Rendah (<i>Low</i>)
3.	Tingkat kerja sama dan jaringan (<i>Level of cooperation and network</i>)	1.197	Tinggi (<i>High</i>)
	Jumlah <i>Total</i>	2.187	Tinggi (<i>High</i>)

Keterangan: Total Skor 0 – 987 = Rendah, 988 – 1.974 = Sedang, 1.975 – 2.961 = Tinggi

Description: Score Total 0 – 987 = Low, 988 – 1,974 = Medium, 1,975 – 2,961 = High

Sumber (*Source*): Data primer (*Primary data*).

Kajian sosekbud masyarakat Desa Tanjung Aur II dan masyarakat penggarap lahan hutan negara di wilayah Desa Tanjung Aur II menunjukkan bahwa kelembagaan calon pengelola Hutan Desa di Desa Tanjung Aur II belum terbentuk. Dalam Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor: P.89/Menhut-II/2014 disebutkan bahwa lembaga pengelola Hutan Desa yang selanjutnya disebut lembaga desa adalah lembaga kemasyarakatan desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa yang bertugas untuk mengelola Hutan Desa yang secara fungsional berada dalam organisasi desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai indikator dan kriteria lembaga pengelola Hutan Desa tersebut.

Lembaga pengelola Hutan Desa idealnya adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang beranggotakan masyarakat desa setempat. Akan tetapi, kondisi ini sulit terpenuhi dikarenakan BUMDES yang ada saat ini bergerak di bidang penyewaan tenda dan kursi dan belum berfungsi dengan baik. Keanggotaan BUMDES saat ini masih dirangkap oleh aparat desa. Anggota lembaga pengelola Hutan Desa sebaiknya merupakan warga desa setempat yang berinteraksi langsung dengan hutan negara. Namun, kondisi ini pun sulit terpenuhi karena hanya 3 KK saja masyarakat Desa Tanjung Aur II berinteraksi langsung dengan kawasan hutan negara di desa tersebut. Masyarakat yang menggarap lahan hutan negara didominasi oleh warga dari luar Desa Tanjung Aur II.

Kelembagaan pengelola Hutan Desa yang paling mungkin dibentuk adalah kelembagaan kolaborasi antara masyarakat penggarap lahan hutan negara dan perwakilan masyarakat Desa Tanjung Aur II. Kolaborasi merupakan salah satu bentuk pengorganisasian dan model kerja sama antar organisasi (Raharja, 2010). Suporahardjo *et al.* (2005) menyatakan bahwa kolaborasi merupakan pendekatan pengorganisasian umum yang memiliki manfaat dan tingkat keberhasilan yang tinggi walaupun tidak mudah dalam pelaksanaannya.

Membangun kolaborasi dimulai dengan membangun kesepahaman antar pihak (Winara & Mukhtar, 2011). Pihak yang dimaksud di sini adalah warga penggarap lahan hutan negara dan perwakilan warga Desa Tanjung Aur II. Tadjudin (2000) menyatakan bahwa kelembagaan kolaborasi yang dibangun akan sukses apabila ditopang oleh beberapa pilar antara lain dukungan sosial budaya, pemaduan kelembagaan, dukungan administratif, dukungan keuangan, dan reduksi konflik. Suporahardjo *et al.* (2005) menyebutkan bahwa dalam membangun kolaborasi perlu mengakomodir berbagai kepentingan yang terkait dengan hak, tanggung jawab, aturan dan pendapatan.

Pengelolaan Hutan Desa memerlukan kelembagaan yang kuat, yang mampu dibangun dengan dukungan semua *stakeholder* terkait. Keberadaan fasilitator yang mampu menjembatani proses pembentukan dan penguatan kapasitas kelembagaan pengelola Hutan Desa pun mutlak diperlukan. Instansi pemerintah pusat dan daerah dapat melaksanakan peran fasilitasnya dengan menunjuk fasilitator yang mampu mendampingi dan memfasilitasi pembangunan dan penguatan lembaga desa. Selain penyediaan SDM fasilitator, dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana pun mutlak difasilitasi.

D. Dukungan Stakeholder

Analisis pemangku kepentingan (*stakeholder*) ditujukan untuk mengetahui posisi masing-masing *stakeholder* dalam implementasi program Hutan Desa. Pemetaan kepentingan, kekuatan dan pengaruh *stakeholder* bermanfaat dalam menilai kapasitas dan peranan masing-masing *stakeholder* di dalam implementasi program Hutan Desa di Desa Tanjung Aur II. Berdasarkan analisis kategori gabungan (Febriani, 2012; Reed *et al.*, 2009; Silverstein *et al.*, 2009), didapatkan tiga kategori kelompok *stakeholder*, yaitu *stakeholder* utama/*key stakeholder* (hijau), *stakeholder* pendukung/*supporter* (kuning), dan *stakeholder* pelengkap/*complementer* (oranye) sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Matrik posisi *stakeholder* berdasarkan kekuatan, kepentingan, dan pengaruh (hasil analisis *stakeholder*)

Table 2. The matrix of *stakeholders* positioning based on strengths, interests, and influence (*stakeholders* analysis results)

Tingkat kepentingan <i>stakeholder</i> (Level of <i>stakeholders</i> interests)	Tingkat kekuatan <i>stakeholder</i> (Level of <i>stakeholders</i> strengths)	Tingkat pengaruh <i>stakeholder</i> (Level of <i>stakeholders</i> influence)	
		Pengaruh rendah (Low influence)	Pengaruh tinggi (High influence)
Kepentingan rendah (Low interests)	Kekuatan rendah (Low strengths)	-	-
	Kekuatan tinggi (High strengths)	-	-
Kepentingan tinggi (High interests)	Kekuatan rendah (Low strengths)	Bappeda Kab BS; Universitas Bengkulu	DPRD Kab BS; PT Jatropha Solutions
	Kekuatan tinggi (High strengths)	-	BPDAS Ketahun; Dishut Prov Bengkulu; Dishut ESDM Kab BS; LSM Ulayat; Aparatur Desa Tj Aur II

Sumber (Source): Data primer (Primary data).

Jusuf & Rauf (2011) menyatakan implementasi Hutan Desa dapat berhasil bila dilakukan dengan model pengelolaan kolaboratif melalui keterlibatan berbagai *stakeholder* yang berkepentingan baik pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi maupun organisasi non pemerintah. Sesuai alur proses implementasi program di dalam peraturan mengenai Hutan Desa, kolaborasi ini dapat dibangun sejak proses penentuan calon areal kerja Hutan Desa dan fasilitasi pembentukan lembaga desa. Guna kelancaran pelaksanaan fasilitasi program, *stakeholder* kunci seyogyanya melibatkan pihak legislatif untuk mendukung penganggaran fasilitasi program dan menjadikan program Hutan Desa sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.

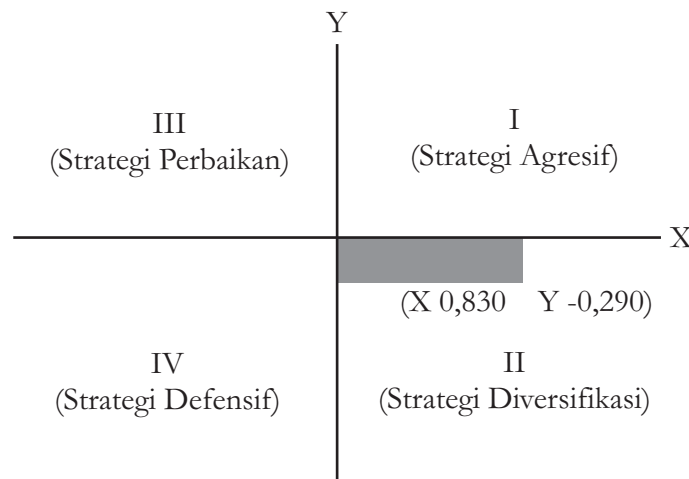
Keberadaan PT Jatropha Solutions dengan dukungan sarana prasarana yang dimilikinya harus dimanfaatkan juga dengan baik oleh *stakeholder* kunci untuk kelancaran fasilitasi program. Untuk semakin memperlancar fasilitasi program, *stakeholder* pelengkap seperti Bappeda Kabupaten Bengkulu Selatan dan Universitas Bengkulu dapat juga dilibatkan oleh *stakeholder* kunci sesuai kapasitasnya masing-masing.

Dalam Permenhut Nomor: P.89/Menhut-II/2014 fasilitasi didefinisikan sebagai upaya penyediaan kemudahan dalam memberikan hak pengelolaan Hutan Desa dengan cara pengembangan kelembagaan, pengembangan usaha, bimbingan teknologi, pendidikan dan latihan, serta akses terhadap pasar. Tujuan fasilitasi adalah untuk meningkatkan kemampuan desa dan lembaga desa dalam

penyelenggaraan Hutan Desa. Bentuk fasilitasi dapat berupa pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pembentukan dan pengembangan kelembagaan, pengusulan areal kerja, bimbingan penataan batas areal kerja, bimbingan penyusunan rencana kerja, pengembangan usaha, bimbingan teknologi, serta akses terhadap pasar dan modal. Fasilitasi dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah sesuai kewenangannya. Perguruan tinggi, LSM, lembaga keuangan, koperasi, Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Swasta (BUMN/D/S) dapat membantu pelaksanaan fasilitasi setelah berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait sesuai kewenangannya.

D. Strategi Implementasi Program Hutan Desa

Penyusunan strategi dilakukan melalui proses pemaduan (*integration*) faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) menggunakan matrik SWOT. Pemaduan ini bertujuan untuk mencari alternatif strategi terbaik yang mungkin diterapkan dalam implementasi program Hutan Desa di Desa Tanjung Aur II. Strategi yang akan diterapkan dalam implementasi program Hutan Desa di Desa Tanjung Aur II ditentukan oleh hasil kecenderungan faktor internal dan eksternal yang digambarkan pada sumbu x dan y kuadran SWOT. Pertemuan sumbu x (0,830) dan y (-0,290) menggambarkan area kuadran strategi yang akan dipakai, yaitu kuadran II atau strategi



Sumber (Source): Data primer (Primary data)

Gambar 3. Kuadran strategi implementasi program Hutan Desa
 Figure 3. Quadrant of implementation strategy of Village Forest program

Dalam aplikasi strategi diversifikasi, seluruh kekuatan internal yang dimiliki dimanfaatkan untuk menghindari atau mengurangi ancaman eksternal yang ada. Strategi-strategi terpilih tersebut selanjutnya dinilai skala prioritasnya. Penentuan prioritas strategi dilakukan dengan menggunakan

analisis *Quantitative Strategic Planning Matrix/QSPM* (David, 2009). Strategi terpilih beserta urutan prioritas strategi implementasi program Hutan Desa di Desa Tanjung Aur II sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 3. Matrik SWOT dan hasil perhitungan prioritas strategi selengkapnya pada Lampiran 3 dan 4.

Tabel 3. Strategi dan prioritas strategi implementasi program Hutan Desa di Desa Tanjung Aur II
 Table 3. Strategies and priorities of the Village Forest implementation strategy in Tanjung Aur II

Strategi (Strategy)	TAS (TAS)	Prioritas (Priority)
1. Membentuk lembaga pengelola hutan desa yang beranggotakan masyarakat desa dan masyarakat luar desa yang menggarap lahan hutan negara di Desa Tanjung Aur II. (Establish the Village Forest manager institution that consists of the villagers and outside community which encroach state forest land in the Village of Tanjung Aur II).	4,352	IV
2. Menetapkan kewajiban lembaga pengelola untuk memberikan kontribusi atau kompensasi ke kas desa atau kas lembaga desa yang sebagiannya dipergunakan untuk mendukung pembiayaan fasilitasi program secara mandiri. (Set the liability of manager institutions to contribute or give compensation to the village cash or to the cash of village institutions that in part used to support financing program facilitation independently).	3,888	V
3. Menetapkan kewajiban lembaga pengelola untuk mencegah dan melindungi kawasan hutan negara yang termasuk dalam areal kerja hutan desa dan areal di sekitarnya dari berbagai ancaman perambahan dan perusakan hutan. (Set the liability of manager institutions to prevent and protect the state forest area is included in the working area of the Village Forest and the surrounding area from various threats of encroachment and destruction of forests).	5,073	II
4. Mencari dan meminta dukungan dari stakeholder terkait ataupun pihak-pihak lainnya yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk melakukan fasilitasi dan pendampingan. (Seeking and asking for support from relevant stakeholders or other parties who had the capacity and capability to undertake facilitation and assistance).	5,395	I
5. Memasukkan rencana implementasi dan pengembangan Hutan Desa ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Tahunan Desa Tanjung Aur II. (Enter the plan of implementation and development of the Village Forest into the Medium Term Development Plans and Annual Plans of the Village of Tanjung Aur II).	4,544	III

Sumber (Source): Data primer (Primary data)

Matrik QSPM menunjukkan bahwa strategi prioritas pertama adalah “mencari dan meminta dukungan dari *stakeholder* terkait ataupun pihak-pihak lainnya yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk melakukan fasilitasi dan pendampingan”, dengan total nilai ketertarikan (*total attractiveness score/TAS*) 5,395. Strategi ini menjadi prioritas utama untuk dilakukan karena masyarakat desa dan masyarakat penggarap lahan hutan negara di Desa Tanjung Aur II memiliki banyak keterbatasan untuk dapat menindaklanjuti rencana implementasi program Hutan Desa. Tanpa ada bantuan fasilitasi dan pendampingan dari pihak-pihak terkait implementasi program Hutan Desa di Desa Tanjung Aur II sulit untuk dilaksanakan.

Dwiprabowo, Mulayngrum, & Suwarno (2013) dan Ruhimat menyatakan bahwa implementasi suatu kebijakan atau program dapat berjalan efektif apabila dirumuskan berdasarkan masalah yang tepat dan pelaku serta sasaran memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menjalankannya. Keberhasilan suatu kebijakan atau program sangat ditentukan oleh pelaksanaan peran masing-masing pemangku kepentingan (Dwiprabowo *et al.*, 2013; Magdalena, 2013). Kehadiran dan peran aktif fasilitator/pendamping sejak awal rencana implementasi program merupakan hal penting yang mendukung keberhasilan implementasi program Hutan Desa di Desa Tanjung Aur II. Magdalena (2013) menyatakan bahwa tantangan perlindungan dan pengelolaan hutan di Indonesia seringkali datang dari masyarakat lokal di dalam dan di sekitar hutan. Untuk itu pemahaman fasilitator/pendamping terhadap kelompok masyarakat sasaran mutlak diperlukan. Melihat beberapa kasus implementasi program perhutanan sosial lainnya, yaitu Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang diteliti oleh Dwiprabowo *et al.*, (2013), masyarakat pelaku umumnya tidak mampu bila harus menyusun sendiri dokumen usulan dan rencana program. Untuk itu masyarakat memerlukan bantuan pendamping maupun pelaksana kebijakan.

Strategi berikutnya yang harus dijalankan adalah “menetapkan kewajiban lembaga pengelola untuk mencegah dan melindungi kawasan hutan negara yang termasuk dalam areal kerja Hutan Desa dan areal di sekitarnya dari berbagai ancaman perambahan dan perusakan hutan”. Ini merupakan strategi prioritas kedua dengan TAS 5,073. Fasilitator/pendamping harus betul-betul menekankan kepada

masyarakat target yang akan ditetapkan sebagai lembaga pengelola Hutan Desa mengenai kewajiban utama mereka untuk mencegah dan melindungi kawasan hutan negara dari berbagai ancaman perambahan dan perusakan hutan. Ekawati (2013) berdasarkan hasil kajiannya menyatakan bahwa peran masyarakat perlu diperkuat, terutama dalam perlindungan dan pengamanan hutan, karena masyarakat adalah unsur utama dalam pengelolaan hutan.

Lembaga pengelola Hutan Desa harus mampu mencegah terjadinya perluasan perambahan, perusakan hutan, ataupun aktivitas ilegal lainnya yang dilakukan oleh masyarakat internal lembaga desa ataupun pihak-pihak dari luar. Upaya pencegahan dan pengendalian ini dilakukan dengan membentuk divisi pengamanan dan perlindungan hutan dalam lembaga pengelola Hutan Desa, serta membuat jaringan komunikasi yang menghubungkan lembaga desa, aparatur desa, Dishut ESDM Bengkulu Selatan, serta pihak berwenang lainnya seperti Kepolisian Resort (POLRES) Bengkulu Selatan, Komando Distrik Militer (KODIM) 0408 Bengkulu Selatan, dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Bengkulu.

Strategi prioritas ketiga yang selanjutnya diterapkan adalah “memasukkan rencana implementasi dan pengembangan Hutan Desa ke dalam RPJMDes dan Rencana Tahunan Desa Tanjung Aur II”. Strategi ini memiliki nilai TAS 4,544. Keterbatasan dana fasilitasi dan pendampingan program yang dianggarkan oleh *stakeholder* terkait mengharuskan desa mencari sumber-sumber pembiayaan secara mandiri. Salah satunya adalah dengan memasukkan program Hutan Desa ke dalam dokumen rencana pembangunan dan anggaran desa, seperti RPJMDes dan Rencana Tahunan Desa. Hal ini dimungkinkan karena di dalam peraturan Hutan Desa disebutkan bahwa pembiayaan penyelenggaraan Hutan Desa salah satunya dapat bersumber dari anggaran/keuangan desa (Kemenhut, 2014).

Setelah tersedia fasilitator/pendamping, terjalin komunikasi dengan masyarakat target, dan ada kejelasan sumber pembiayaan, langkah berikutnya adalah mulai membentuk format calon lembaga pengelola Hutan Desa. Ini tertuang dalam strategi prioritas keempat “membentuk lembaga pengelola hutan desa yang beranggotakan masyarakat desa dan masyarakat luar desa yang

menggarap lahan hutan negara di Desa Tanjung Aur II” dengan TAS 4,352. Menurut Permenhut Nomor: P.89/Menhut-II/2014 tentang Hutan Desa, Lembaga Desa Pengelola Hutan Desa yang selanjutnya disebut Lembaga Desa adalah lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa yang bertugas untuk mengelola Hutan Desa yang secara fungsional berada dalam organisasi desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Jika mengacu kepada mekanisme yang telah diatur di dalam peraturan terdahulu (Permenhut Nomor: P.49/Menhut-II/2008), BUMDES merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan yang dapat memperoleh hak pengelolaan hutan desa. BUMDES yang telah mendapatkan hak pengelolaan hutan desa akan menyusun rencana pengelolaan hutan desa serta memfasilitasi masyarakat desa mengelola unit-unit usaha kehutanan di dalam areal kerja Hutan Desa (Jusuf & Rauf, 2011).

BUMDES yang ada di Desa Tanjung Aur II saat ini bergerak di bidang penyewaan tenda dan kursi dan hanya beranggotakan masyarakat desa setempat. Untuk itu, perlu dibentuk kelembagaan desa yang secara khusus menangani Hutan Desa. Lembaga Pengelola Hutan Desa tersebut harus beranggotakan masyarakat desa dan masyarakat luar desa yang menggarap lahan hutan negara di Desa Tanjung Aur II yang tergabung dalam kelompok-kelompok talang (kebun). Hal ini penting, karena kelompok masyarakat inilah yang telah berinteraksi dan mendapatkan manfaat secara langsung dari areal hutan negara tersebut. Masyarakat ini membutuhkan legalitas hak kelola atas lahan hutan negara yang telah mereka garap. Untuk mendapatkan legalitas ini, masyarakat siap berperan aktif dan mengikuti semua ketentuan dalam penyelenggaraan program Hutan Desa.

Selain masyarakat penggarap lahan hutan negara yang tergabung dalam kelompok-kelompok talang (kebun), beberapa tokoh atau perwakilan masyarakat Desa Tanjung Aur II dapat dimasukkan dalam kepengurusan lembaga pengelola Hutan Desa. Perwakilan masyarakat desa ini dapat difungsikan sebagai pengawas dan penghubung lembaga dengan masyarakat Desa Tanjung Aur II. Bukan hal yang tidak mungkin bila ingin melibatkan lebih banyak masyarakat lainnya yang tidak berinteraksi langsung dengan hutan negara. Akan tetapi, selain tidak tepat sasaran, ada kekhawatiran lain bahwa masyarakat tersebut hanya ingin

mendapatkan pengakuan hak kelola saja tanpa mau melakukan kewajibannya. Untuk itulah, keanggotaan lembaga pengelola Hutan Desa ini dibatasi hanya bagi penggarap lahan hutan negara di Desa Tanjung Aur II dan beberapa perwakilan masyarakat desa. Secara struktural, lembaga pengelola Hutan Desa ini tetap berada di bawah koordinasi Aparatur Desa Tanjung Aur II.

Strategi selanjutnya adalah “menetapkan kewajiban lembaga pengelola untuk memberikan kontribusi atau kompensasi ke kas desa atau kas lembaga desa yang sebagiannya dipergunakan untuk mendukung pembiayaan fasilitas program secara mandiri”. Strategi prioritas kelima ini memiliki TAS 3,888. Keterbatasan dana fasilitasi dan pendampingan program yang dianggarkan oleh *stakeholder* kembali menjadi alasan yang mengharuskan desa/lembaga desa kreatif mencari sumber-sumber pembiayaan secara mandiri. Salah satunya adalah dengan menetapkan kewajiban iuran bagi semua anggota lembaga pengelola Hutan Desa dengan besaran yang disepakati dan tidak memberatkan.

Salah satu skema yang mungkin dapat diterapkan adalah menetapkan iuran wajib tahunan per luas areal garapan. Besarnya iuran ditentukan secara rasional dan tidak memberatkan anggota lembaga desa, misalkan uang yang setara 5 kg biji kopi kering per hektar per tahun. Besaran iuran, waktu pembayaran, mekanisme dan kepada siapa iuran dibayarkan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan dikelola secara transparan dan akuntabel. Berdasarkan pengalaman masyarakat Desa Setulang, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang diteliti Magdalena (2013), transparansi dan akuntabilitas merupakan salah satu komponen penting dalam mewujudkan tata kelola hutan yang baik. Ketidakterbukaan dan kurangnya akuntabilitas pengelolaan dana pengelolaan hutan akan merugikan pengelola dan masyarakat yang terlibat.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kondisi biogeofisik areal hutan negara di Desa Tanjung Aur II memenuhi persyaratan dan layak diusulkan sebagai areal kerja

Hutan Desa. Kondisi sosekbud masyarakat di wilayah Desa Tanjung Aur II memungkinkan untuk membentuk lembaga pengelola Hutan Desa, melalui kolaborasi masyarakat penggarap lahan hutan negara dan perwakilan masyarakat Desa Tanjung Aur II. *Stakeholder* terkait siap memberikan dukungan fasilitasi dan pendampingan sesuai kapasitas dan kapabilitasnya masing-masing. *Stakeholder* kunci dalam implementasi program Hutan Desa di Desa Tanjung Aur II adalah BPDAS Ketahun, Dishut Provinsi Bengkulu, Dishut ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan, LSM Ulayat, dan Aparatur Desa Tanjung Aur II. Strategi implementasi program Hutan Desa yang sesuai untuk Desa Tanjung Aur II adalah strategi kompetitif atau diversifikasi (strategi S-T), dengan prioritas utama mencari dan meminta dukungan dari *stakeholder* terkait ataupun pihak-pihak lainnya yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk melakukan fasilitasi dan pendampingan.

B. Saran

Berdasarkan hasil kajian, peneliti menyarankan agar:

1. BPDAS Ketahun, Dishut Provinsi Bengkulu, dan Dishut ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan dapat segera memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fasilitator Hutan Desa dan segera menginisiasi proses fasilitasi dan pendampingan calon lembaga pengelola Hutan Desa di Desa Tanjung Aur II dengan melibatkan peran serta aparatur desa dan LSM Ulayat.
2. Pemerintah desa dan calon lembaga pengelola Hutan Desa di Desa Tanjung Aur II dengan didampingi *stakeholder* terkait dan fasilitator Hutan Desa segera membuat usulan penetapan areal kerja Hutan Desa.
3. Seluruh *stakeholder* terkait dapat berperan aktif dalam pelaksanaan implementasi program Hutan Desa di Desa Tanjung Aur II dan melaksanakan implementasi program berdasarkan strategi yang telah disusun.
4. Pemerintah pusat dapat mengakomodir pemanfaatan lahan hutan untuk aktivitas budi daya tanaman tahunan dengan penerapan pola agroforestri yang sesuai dan memasukkannya sebagai salah satu bentuk pemanfaatan kawasan dalam peraturan mengenai Hutan Desa.

UCAPAN TERIMA KASIH (ACKNOWLEDGEMENT)

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku pemberi beasiswa tugas belajar dan sponsor utama kegiatan penelitian. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada pihak keluarga, Aparatur dan Masyarakat Desa Tanjung Aur II, PT Jatropha Solutions, BPDAS Ketahun, LSM Ulayat Bengkulu, Dishut Provinsi Bengkulu, Dishut ESDM Bengkulu Selatan, DPRD Bengkulu Selatan, Bappeda Bengkulu Selatan, dan Jurusan Kehutanan Universitas Bengkulu atas dukungan dan bantuannya selama kegiatan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2006). *Membangun desa partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Anantanyu, S. (2011). Kelembagaan petani: Peran dan strategi pengembangan Kapasitasnya. *Jurnal SEPA*, 7(2), 102-109.
- Borrini-Feyerabend, G. (2003). Injustice and conservation is "local support" necessary for sustainable protected areas? *Journal of Policy Matters*, 12, 92-101. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>.
- BPS. (2010). *Data spasial sketsa wilayah administrasi desa dan kelurahan di Provinsi Bengkulu (data)*. Jakarta: Forum GIS.
- BPS Kabupaten Bengkulu Selatan. (2013). *Bengkulu Selatan dalam angka 2013*. Manna: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Selatan (BPS Kab BS).
- Brunner, J., Seymour, F., & Badenoch, N. (1999). *Forest problems and law enforcement in Southeast Asia: role of local communities*. Retrieved February 5, 2015, from <http://www.mekonginfo.org/assets/midocs/0001561-environment-forest-problems-and-law-enforcement-in-southeast-asia-the-role-of-local-communities.pdf>.
- Cahyono, E. (2012). Konflik kawasan konservasi dan kemiskinan struktural. *Jurnal Politika*, 8(1), 7-41.
- David, F. R. (2009). *Manajemen strategis konsep*. (P. Wuriarti, Ed.) (12th ed.). Jakarta: Salemba Empat.

- Dit BPS Kemenhut. (2015). *Basis data hutan desa per 2 Januari 2015 (data)*. Jakarta: Direktorat Bina Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan (unpublished).
- Dwiprabowo, H., Mulyaningrum, & Suwarno, E. (2013). Organisasi belajar dan implementasi kebijakan hutan kemasyarakatan (HKm). *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 10(2), 85-98.
- Ekawati, S. (2013). Evaluasi implementasi kebijakan desentralisasi pengelolaan hutan produksi. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 10(3), 187-202.
- Febriani, D. (2012). *Evaluasi proses implementasi kebijakan hutan tanaman rakyat di Kabupaten Sarolangun Jambi*. (Disertasi). Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Gautama, I. (2007). Studi sosial ekonomi masyarakat pada sistem agroforestry di Desa Lasiwala Kabupaten Sidrap. *Jurnal Hutan dan Masyarakat*, 2(3), 319-328.
- Grootaert, C., Narayan, D., Jones, V. N., & Woolcock, M. (2004). *Measuring social capital: An integrated questionnaire*. (World Bank Working Paper). Washington D.C.: The World Bank. <https://doi.org/10.1596/0-8213-5661-5>.
- Jusuf, Y., & Rauf, F. (2011). Studi pengusulan hutan desa di Desa Bonto Marannu Kecamatan Ulu Ere Kabupaten Bantaeng. *Jurnal Hutan dan Masyarakat*, 1(2), 79-91.
- Kartodihardjo, H. (2007). *Di balik kerusakan hutan dan bencana alam: Masalah transformasi kebijakan kehutanan*. Jakarta: YKHI.
- Kemitraan. (2011). Mendorong percepatan program hutan kemasyarakatan dan hutan desa. *Partnership Policy Paper No. 4/2011*.
- Lacuna-Richman, C. (2012). *Growing from seed: An introduction to social forestry*. Finland: Springer.
- Magdalena. (2013). Peran hukum adat dalam pengelolaan dan perlindungan hutan di Desa Sesaot, Nusa Tenggara Barat dan Desa Setulang, Kalimantan Timur. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 10(2), 110-121.
- Maring, P. (2013). Transformasi konflik menuju kolaborasi: Kasus resolusi konflik penguasaan hutan. *Jurnal Insani*, 1(14), 51-60.
- Miles, M. B., & Huberman, M. a. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Evaluation and Program Planning (2nd ed., Vol. 19)*. California: SAGE Publications Inc. [https://doi.org/10.1016/0149-7189\(96\)88232-2](https://doi.org/10.1016/0149-7189(96)88232-2).
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.89/Menhut-II/2014 tentang Hutan Desa.
- Prasetyo, A. (2011). *Modul dasar sistem informasi geografis*. Bogor: Lab. Analisis Lingkungan dan Permodelan Spasial Dep. KSHE, Fahutan IPB.
- Prasetyo, B. A. (2013). *Serba serbi hutan desa*. Retrieved August 17, 2015, from <http://bp2sdmk.dephut.go.id/emagazine/index.php/teknis/1-serba-serbi-hutan-desa.html>.
- Premono, B. T., & Lestari, S. (2013). Analisis finansial agroforestri Kayu Bawang (*Dysoxylum mollissimum* Blume) dan kebutuhan lahan minimum di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 10(4), 211-223.
- Raharja, S. J. (2010). Pendekatan kolaboratif dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citarum. *Jurnal Bumi Lestari*, 10(2), 222-235.
- Rangkuti, F. (1997). *Analisis SWOT: Teknik membedah kasus bisnis, cara perhitungan bobot, rating, dan OCAI*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Reed, M. S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., ... Stringer, L. C. (2009). Whos in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management. *Journal of Environmental Management*, 90(5), 1933-1949. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2009.01.001>.
- Ruhimat, I. S. (2013). Model peningkatan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan kesatuan pengelolaan hutan: Studi kasus di KPH Model Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 10(3), 255-267.
- Sahide, M. A. K. (2011). *Membangun hutan desa, 10 tips bagi fasilitator*. (A. Santosa, Ed.). Bogor: FKKM dan Ford Foundation.
- Silverstein, D., Samuel, P., & DeCarlo, N. (2009). *The innovators toolkit: 50+ techniques for predictable and sustainable organic growth*. New Jersey: John Wiley and Sons Inc.
- Singarimbun, M., Effendi, S., Hagul, P., Manning, C., Singarimbun, I., Ancok, D., ... Tukiran. (2006). *Metode penelitian survei*. (M. Singarimbun & S. Effendi, Eds.). Jakarta: LP3ES.
- Subarna, T. (2011). Faktor yang memengaruhi masyarakat menggarap lahan di hutan lindung:

- Studi kasus di Kabupaten Garut Jawa Barat. *Jurnal Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 8(4), 265-275.
- Sugiyono. (2009). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R & D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kombinasi (mixed methods)*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sumanto, S. E. (2009). Kebijakan pengembangan perhutanan sosial dalam perspektif resolusi konflik. *Analisis Kebijakan Kehutanan*, 6(1), 13-25.
- Suporahardjo, Ramirez, R., Daniels, S. E., Walker, G. B., Grimble, R., Chan, M., ... Fisher, R. J. (2005). *Manajemen kolaborasi: Memahami pluralisme membangun konsensus*. (Suporahardjo, Ed.). Bogor: Pustaka Latin.
- Tadjudin, D. (2000). *Manajemen kolaborasi*. Bogor: Pustaka Latin.
- Winara, A., & Mukhtar, A. S. (2011). Potensi kolaborasi dalam pengelolaan Taman Nasional Teluk Cenderawasih di Papua. *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam*, 8(3), 217-226.
- Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Wiyono, E. B., & Santoso, H. (2009). *Hutan desa: Kebijakan dan mekanisme kelembagaan*. Jakarta: Working Group Pemberdayaan Departemen Kehutanan.

Lampiran 1. Rincian Tahapan Penelitian
Appendix 1. Details of Research Stages

No.	Tahapan/tujuan penelitian (Stages/research purposes)	Variabel penelitian (Research variable)	Data/informasi yang dikumpulkan (Data/ information collected)	Metode pengumpulan data (Collecting data method)	Sumber data (Data source)	Metode analisis data (Data analyze method)	Keluaran (Output)
1	Mengidentifikasi kondisi biogeofisik kawasan hutan yang terkait dengan persyaratan areal kerja Hutan Desa. (Identify bio-geophysical conditions of forests associated with the requirements of the work area)	Biogeofisik/ <i>bio-geophysical</i>	Peta: administrasi; kawasan hutan; tutupan lahan; keterangan; jalan; sungai; DAS; lahan kritis; RTRW; perizinan; sebaran kegiatan PS (Map: administration; state forest area; land cover; slope; road; river; watershed; degraded land; spatial area plan; social forestry activities distribution)	Dokumentasi (Documentation)	Bappeda Kab. BS; BPS Kab. BS; BPDAS Ketahun; Dishut ESDM Kab. BS (South Bengkulu Regional Planning Office; South Bengkulu Stastical Office; Ketahun Watershed Management Office; South Bengkulu Forestry and Mining Office)	Tumpang susun (Overlay) (Prasetyo, 2011)	Data/informasi biogeofisik desa dan kawasan hutan Desa Tanjung Aur II (bio-geophysical data/ information of village and forest state in Tanjung Aur II) Peta rencana calon areal kerja Hutan Desa Tanjung Aur II (Map of Village Forest working area plan in the Village of Tanjung Aur II)
2	Menganalisis kondisi sosekbud masyarakat Desa Tanjung Aur II yang terkait dengan persyaratan kelembagaan Hutan Desa. (Analyze the conditions of socio-economic-cultural society associated with institutional requirement)	Sosekbud/ <i>socio-economic-cultural</i>	Data/Informasi: Potensi pemanfaatan hutan (kawasan, jasleng, kayu, HHHBK) (Data / Information: The potential use of the forest (land, environmental services, wood, non timber forest product)) Data/Informasi: kependudukan; pendapatan; kesejahteraan; kelembagaan; interaksi masyarakat dengan hutan; modal sosial; konflik; persepsi terhadap hutan Desa (Data / Information: population; income; welfare; institutional; community interaction with forests; social capital; conflict; perceptions of village forest)	Triangulasi/ (Triangulation)	Responden/informan dan Hasil Observasi Lapangan (Respondent/informant and field observation result)	Deskriptif Kualitatif (descriptive qualitative) (Miles & Huberman, 1994)	Data/informasi sosekbud masyarakat Desa Tanjung Aur II (Data/ information of socio-economic-cultural society in Tanjung Aur II) Potensi pembentukan lembaga pengelola Hutan Desa Tanjung Aur II (The potential of management institutions formation of Village Forest in Tanjung Aur II)

Lampiran 1. Lanjutan
Appendix 1. Continued

No.	Tahapan/tujuan penelitian (Stages/research purposes)	Variabel penelitian (Research variable)	Data/informasi yang dikumpulkan (Data/information collected)	Metode pengumpulan data (Collecting data method)	Sumber data (Data source)	Metode analisis data (Data analyze method)	Keluaran (Output)
3	Menganalisis dukungan stakeholder yang terkait dengan fasilitasi dan pendampingan dalam implementasi program Hutan Desa. (Analyze the support of stakeholders associated with the facilitation and mentoring)	Dukungan Stakeholder/ (Stakeholders support)	Data/Informasi Kepentingan, pengaruh; dan kekuatan stakeholder terkait (Data/Information: Interest; influence; and strengths of relevant stakeholders)	Kuisisioner dan wawancara (Questioner and interview)	Responden/informan (Respondent/informant)	Analisis kategori gabungan (Combined categorical analysis) (Febriani, 2012; Reed et al, 2009; Silverstein et al, 2009)	Data/informasi stakeholder terkait (Data/information about relevant stakeholders) Potensi dukungan fasilitasi dan pendampingan dari stakeholder terkait (The potential of facilitate and mentoring support from relevant stakeholders)
4	Memformulasikan strategi implementasi program Hutan Desa (Formulate strategies for the implementation of Village Forest program)	Biogeofisik, Sosekbud, dan Dukungan stakeholder/ (Biogeophysical, Socioeconomic cultural, and stakeholders support)	Data/Informasi Faktor internal (kekuatan dan kelemahan); Faktor eksternal (peluang dan ancaman) (Data/Information: Internal factors (strength and weaknesses); External factors (opportunities and threats))	Kuisisioner dan wawancara (Questioner and interview)	Responden/Informan dan Hasil Pengumpulan Data sebelumnya (Respondent/informant and data collection before its	IFE, EFE, SWOT, dan QSPM (IFE, EFE, SWOT, and QSPM) (Adisasmita, 2006; David, 2009; Rangkuti, 1997)	Strategi Implementasi Program Hutan Desa di Desa Tanjung Aur II (Implementation strategy of Village Forest program in Tanjung Aur II Village)

Sumber (Source): Pengolahan data primer dan sekunder (Processed from primary and secondary data)

Lampiran 2. Hasil identifikasi kelayakan calon areal kerja Hutan Desa di Desa Tanjung Aur II
Appendix 2. *The feasibility identification results of prospective Village Forest work area in Tanjung Aur II*

No.	Variabel biogeofisik (Bio-geophysics variable)	Ketentuan Permenhut P89/Menhut-II/2014 dan Perdirjen RLPS P03/V-Set/2009 (The provisions of regulation P.89 / Menthut-II / 2014 and P.03 / V-Set / 2009)	Kondisi riil (Real conditions)	Identifikasi kelayakan dan rekomendasi (Identification of feasibility and recommendations)
1.	Status hutan (Forest status)	Hutan negara (State forest)	Hutan negara (State forest)	Layak (Feasible)
2.	Fungsi hutan (Forest function)	Lindung/produksi (Protected/production)	Hutan lindung dan hutan produksi terbatas (Protected forest and limited production forest)	Layak (Feasible)
3.	Perizinan (Licensing)	Tidak dibebani izin (No licensing)	Tidak dibebani izin (No licensing)	Layak (Feasible)
4.	Letak hutan (Forest location)	Dalam wilayah administrasi desa setempat (In the local village administration area)	Dalam wilayah administrasi desa setempat (In the local village administration area)	Layak (Feasible)
5.	Vegetasi dan penutupan lahan (Vegetation and land cover)	Berhutan/tidak, hutan alam/tanaman (Woodland/ no woodland, natural forest/ plantation forest)	Hutan primer campuran, hutan sekunder campuran, kebun campuran (Mix: primary forest, mix: secondary forest, mix: garden)	Layak (Feasible)
6.	Topografi (Topography)	Dिसesuaikan dengan tujuan pemanfaatan (Adapted to the purpose of utilization)	Agak curam – curam (A bit steep till steep)	Layak (Feasible)
7.	Potensi pemanfaatan kawasan hutan lindung (The potential utilization of protected forest areas)	Kawasan: Budi daya tanaman obat, tanaman hias, jamur, lebah, satwa liar, rehabilitasi satwa, dan hijauan makanan ternak (Area: The cultivation of medicinal plants, ornamental plants, mushrooms, bees, wildlife, wildlife rehabilitation, and forage for livestock food)	Kawasan: Budi daya tanaman tahunan kopi, karet, jengkol, dsb (beberapa menerapkan pola agroforestri sederhana) (Area: Cultivation of annual crops such as coffee, rubber, jengkol, etc. (some of implementing a simple agroforestry))	Kurang sesuai, perlu dilakukan penyesuaian regulasi dan praktik budi daya (Less appropriate, necessary of regulatory adjustments and cultivation practices adjustments)
		Jasa lingkungan: Jasa aliran air, air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, penyerapan/ penyimpanan karbon (Environmental services: Services of water flow, water, ecotourism, biodiversity protection, rescue and environmental protection, carbon sequestration/ storage)	Jasa lingkungan: Pemanfaatan jasa aliran air dan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga petani, berburu dan menangkap ikan (Environmental services: Utilization of water flow services and clean water supply for household needs of farmers, hunting and fishing)	Layak, perlu dioptimalkan dan dilakukan penyesuaian regulasi dan praktik pemanfaatan (Feasible, needs to be optimized and adjustments of regulation and utilization practices)
		Pemungutan HHHBK: Rotan, madu, getah, buah, jamur, sarang walet (Collect of NTFPs: Rattan, boney, gum, fruit, mushrooms, swallow's nest)	Pemungutan HHHBK: Rotan, madu, getah, buah, jamur, pakis sayur, tanaman obat, kulit kayu untuk konsumsi rumah tangga petani (Collect of NTFPs: Rattan, boney, sap, fruit, mushrooms, ferns vegetables, herbs, bark for household consumption farmers)	Layak, perlu dioptimalkan dan dilakukan penyesuaian regulasi dan praktik pemanfaatan (Feasible, needs to be optimized and adjustments of regulation and utilization practices)

Lampiran 2. Lanjutan
Appendix 2. Continued

8. Potensi pemanfaatan kawasan hutan produksi (The potential utilization of production forest areas)	<p><i>Kawasan:</i> Budi daya tanaman obat, tanaman hias, jamur, lebah, penangkaran satwa, budi daya sarang burung walet (Area: cultivation of medicinal plants, ornamental plants, musbrooms, bees, animal breeding, bird's nest swiftlet farming)</p>	<p><i>Kawasan:</i> Budi daya tanaman kopi, karet, jengkol, dsb (beberapa menerapkan pola agroforestri sederhana) (Area: Cultivation of annual crops such as coffee, rubber, jengkol, etc. (some of implementing a simple agroforestry))</p>	<p>Kurang sesuai, perlu dilakukan penyesuaian regulasi dan praktik budi daya (Less appropriate, necessary of regulatory adjustments and cultivation practices adjustments)</p>
<p><i>Jasa lingkungan:</i> Jasa aliran air, air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, penyerapan/ penyimpanan karbon (Environmental services : Services of water flow, water, ecotourism, biodiversity protection, rescue and environmental protection, carbon sequestration / storage)</p>	<p><i>Jasa lingkungan:</i> Pemanfaatan jasa aliran air dan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga petani, berburu dan menangkap ikan (Environmental services: Utilization of water flow services and clean water supply for household needs of farmers, hunting and fishing)</p>	<p>Layak, perlu dioptimalkan, dan dilakukan penyesuaian regulasi dan praktik pemanfaatan (Feasible, needs to be optimized and adjustments of regulation and utilization practices)</p>	
<p><i>Pemanfaatan hasil hutan kayu:</i> Dilakukan pada area pemanfaatan dan mengikuti aturan mengenai IUPHHK (Utilization of timber forest products: Performed on the utilization area and follow the rules regarding IUPHHK)</p>	<p><i>Pemanfaatan hasil hutan kayu:</i> Belum dilakukan, hanya sebatas pemungutan (Utilization of timber forest products: Not done, only limited collect)</p>	<p>Layak dan perlu dioptimalkan (Feasible and needs to be optimized)</p>	
<p><i>Pemanfaatan HHBK (alam/tanaman):</i> Rotan, sagu, nipah, bambu, getah, kulit kayu, daun, buah/biji, gaharu (Utilization of NTFPs (natural / plantation): Rattan, sago, palm, bamboo, sap, bark, leaves, fruits / seeds, agarwood)</p>	<p><i>Pemanfaatan HHBK (alam/tanaman):</i> Belum dilakukan, hanya sebatas pemungutan (Utilization of NTFPs (natural / plantation): Not done, only limited collect)</p>	<p>Layak dan perlu dioptimalkan (Feasible and needs to be optimized)</p>	
<p><i>Pemungutan hasil hutan kayu:</i> Maksimum 50 m³ per tahun per lembaga desa dan dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas umum (Collect of timber forest product: Maximum 50 m³ per year per institution and used for the construction of public facilities)</p>	<p><i>Pemungutan hasil hutan kayu:</i> Untuk bangunan pondok dan kayu bakar rumah tangga petani perambah (Collect of timber forest product: For building buts and household firewood of encroachers)</p>	<p>Tidak sesuai dan perlu dilakukan pembinaan (Not appropriate and needs to be done coaching)</p>	
<p><i>Pemungutan HHBK:</i> Rotan, madu, getah, buah/biji, daun, gaharu, kulit kayu, tanaman obat, umbi-umbian (maksimum 20 ton per tahun per lembaga desa) (Collect of NTFPs: Rattan, honey, gum, fruit/ seeds, leaves, bark, agarwood, medicinal plants, tubers (maksimum 20 tons per year per village institution))</p>	<p><i>Pemungutan HHBK:</i> Rotan, madu, getah, buah, jamur, pakis sayur, tanaman obat, kulit kayu untuk konsumsi rumah tangga petani (Collect of NTFPs: Rattan, honey, sap, fruit, musbrooms, ferns vegetables, herbs, bark for household consumption farmers)</p>	<p>Layak dan perlu dioptimalkan (Feasible and needs to be optimized)</p>	

Sumber (Source): Pengolahan data primer dan sekunder (Processed from primary and secondary data)

Lampiran 3. Matrik SWOT Strategi Implementasi Hutan Desa di Desa Tanjung Aur II
Appendix 3. SWOT Matrix of Village Forest in Tanjung Aur II

Kelemahan/weaknesses (W)	Kekuatan/strengths (S)
<p>1. Batas wilayah administrasi desa belum definitif (<i>Administrative boundaries of village have not been definitively</i>)</p> <p>2. Komoditi utama yang dibudi dayakan di lahan hutan negara bukan tanaman kehutanan (pohon penghasil kayu) (<i>The main commodities grown in state forest lands not forestry plants (woody)</i>)</p> <p>3. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap program Hutan Desa (<i>Lack of knowledge and understanding of the community against the Village Forest program</i>)</p> <p>4. Tidak ada norma atau aturan dalam pengelolaan sumberdaya alam (termasuk hutan) yang berlaku secara khusus di desa setempat (<i>No norms/ rules in the management of natural resources (including forests) which applies specifically in the local village</i>)</p> <p>Faktor Internal/ Internal Factors</p>	<p>1. Keberadaan lahan hutan negara (HL dan HPT) dengan luas yang memadai dalam wilayah desa (<i>The existence of state forests (protected forest and limited production forest) with an sufficient area in rural areas</i>)</p> <p>2. Masyarakat memiliki modal sosial yang kuat dalam bentuk kepercayaan (<i>trust</i>) terhadap sesama, pemerintah, dan pihak lain (<i>Villagers have strong social capital in the form of trust to others, governments, and other parties</i>)</p> <p>3. Dukungan aparatur desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat penggarap lahan hutan negara (<i>Support of village officials, community leaders, and cultivators of state forest land</i>)</p>
Peluang/opportunities (O)	Strategi S-O / S-O Strategy
<p>1. Kemudahan aksesibilitas menuju kawasan hutan negara (<i>Ease of accessibility to the area of state forest</i>)</p> <p>2. Ketergantungan masyarakat yang tinggi terhadap lahan hutan negara sebagai lahan usaha pertanian/perkebunan (<i>High dependence of community on state forest lands as the land of farming / plantation</i>)</p> <p>3. Penerapan pola agroforestri oleh masyarakat penggarap lahan hutan negara (<i>Application of agroforestry by cultivators community on state forest land</i>)</p> <p>4. Dukungan stakeholder lainnya sesuai kapasitas dan perannya masing-masing (<i>Support of other stakeholders according to the capacity and role of each</i>)</p>	<p>1. Mengusulkan implementasi program Hutan Desa menjadi bagian rencana prioritas pembangunan daerah di bidang kehutanan (S1, S2, S3, O1, O2, O4). (<i>Proposes the implementation of Villages Forest program become part of the regional development priority plan in the field of forestry (S1, S2, S3, O1, O2, O4).</i>)</p> <p>2. Memasukkan rencana implementasi dan pengembangan Hutan Desa ke dalam RPJMDes Tanjung Aur II (S1, S2, S3, O1, O2). (<i>Enter the implementation plan and the development of the Village Forest into the medium-term development plan of the village of Tanjung Aur II (S1, S2, S3, O1, O2).</i>)</p> <p>3. Membentuk lembaga pengelola hutan desa yang beranggotakan masyarakat desa dan masyarakat luar desa yang menggarap lahan hutan negara di Desa Tanjung Aur II (S1, S2, S3, O1, O2, O3, O4). (<i>Establish the institution of the Village Forest manager that consists of the villagers and outside community which encroach state forest land in the village of Tanjung Aur II (S1, S2, S3, O1, O2, O3, O4).</i>)</p> <p>4. Minta bantuan kepada stakeholder terkait sesuai kapasitas dan perannya masing-masing (fasilitasi, pendampingan, dan anggaran) (S2, S3, O4). (<i>Asked for help to the related stakeholders based on capacity and role of each (facilitation, mentoring, and budget) (S2, S3, O4)</i>)</p> <p>5. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan hutan negara dengan penerapan agroforestri intensif (S1, O4). (<i>Optimizing state forest land use with intensive agroforestri implementation (S1, O4)</i>)</p>
Strategi W-O / W-O Strategy	Strategi S-O / S-O Strategy
<p>1. Mengupayakan percepatan pemetaan dan penetapan batas definitif wilayah Desa Tanjung Aur II melalui kegiatan pemetaan partisipatif dengan meminta bantuan stakeholder terkait (W1, O4). (<i>Do the acceleration of mapping and determination of the Tanjung Aur II territory definite boundary through participatory mapping activities with asking for help related stakeholders (W1, O4).</i>)</p> <p>2. Mengupayakan budi daya tanaman tahunan menjadi salah satu bentuk pemanfaatan kawasan dalam regulasi Hutan Desa (W2, O2, O3). (<i>Strives to propose annual plant cultivation to be one form of land utilization in Forest Village regulation (W2, O2, O3).</i>)</p> <p>3. Mengakomodir bentuk pemanfaatan lahan yang sudah ada saat ini dan mengembangkan pola agroforestri secara intensif (W2, O2, O3). (<i>Accommodate the shape of the existing land use current and developing pattern of intensive agroforestri (W2, O2, O3).</i>)</p> <p>4. Minta stakeholder terkait untuk melakukan sosialisasi mengenai program Hutan Desa dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya hutan (W3, W4, O1, O4). (<i>Ask stakeholders related to conduct socialization about the Villages Forest and legislation related to forest resource management (W3, W4, O1, O4).</i>)</p>	<p>1. Mengusulkan implementasi program Hutan Desa menjadi bagian rencana prioritas pembangunan daerah di bidang kehutanan (S1, S2, S3, O1, O2, O4). (<i>Proposes the implementation of Villages Forest program become part of the regional development priority plan in the field of forestry (S1, S2, S3, O1, O2, O4).</i>)</p> <p>2. Memasukkan rencana implementasi dan pengembangan Hutan Desa ke dalam RPJMDes Tanjung Aur II (S1, S2, S3, O1, O2). (<i>Enter the implementation plan and the development of the Village Forest into the medium-term development plan of the village of Tanjung Aur II (S1, S2, S3, O1, O2).</i>)</p> <p>3. Membentuk lembaga pengelola hutan desa yang beranggotakan masyarakat desa dan masyarakat luar desa yang menggarap lahan hutan negara di Desa Tanjung Aur II (S1, S2, S3, O1, O2, O3, O4). (<i>Establish the institution of the Village Forest manager that consists of the villagers and outside community which encroach state forest land in the village of Tanjung Aur II (S1, S2, S3, O1, O2, O3, O4).</i>)</p> <p>4. Minta bantuan kepada stakeholder terkait sesuai kapasitas dan perannya masing-masing (fasilitasi, pendampingan, dan anggaran) (S2, S3, O4). (<i>Asked for help to the related stakeholders based on capacity and role of each (facilitation, mentoring, and budget) (S2, S3, O4)</i>)</p> <p>5. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan hutan negara dengan penerapan agroforestri intensif (S1, O4). (<i>Optimizing state forest land use with intensive agroforestri implementation (S1, O4)</i>)</p>

Lampiran 3. Lanjutan
Appendix 3. Continued

	Kelemahan/ weaknesses (W)	Kekuatan/ strengths (S)
<p>Faktor Internal/ Internal Factors</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Batas wilayah administrasi desa belum definitif (<i>-Administrative boundaries of village have not been definitively</i>) 2. Komoditi utama yang dibudi dayakan di lahan hutan negara bukan tanaman kehutanan (pohon penghasil kayu) (<i>The main commodities grown in state forest lands not forestry plants (woody)</i>) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan lahan hutan negara (HL dan HPT) dengan luas yang memadai dalam wilayah desa (<i>The existence of state forests (protected forest and limited production forest) with an sufficient area in rural areas</i>)
<p>Faktor Eksternal/ External Factors</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap program Hutan Desa (<i>Lack of knowledge and understanding of the community against the Village Forest program</i>) 4. Tidak ada norma atau aturan dalam pengelolaan sumberdaya alam (termasuk hutan) yang berlaku secara khusus di desa setempat (<i>No norms/ rules in the management of natural resources (including forests) which applies specifically in the local village</i>) 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Masyarakat memiliki modal sosial yang kuat dalam bentuk kepercayaan (trust) terhadap sesama, pemerintah, dan pihak lain (<i>Villagers have strong social capital in the form of trust to others, governments, and other parties</i>) 3. Dukungan aparatur desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat penggarap lahan hutan negara (<i>Support of village officials, community leaders, and cultivators of state forest land</i>)
<p>Ancaman/ threats (T)</p>	<p>Strategi W-T / W-T Strategy</p>	<p>Strategi S-T / S-T Strategy</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan perambahan kawasan hutan negara oleh masyarakat dari luar desa setempat (<i>Increased state forest land encroachment by people from outside the local village</i>) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat kesepakatan dengan desa yang bersebelahan mengenai batas-batas wilayah desa (W1, T1). (<i>Make a deal with neighbour village about territorial boundaries of the village (W1, T1)</i>) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk lembaga pengelola hutan desa yang beranggotakan masyarakat desa dan masyarakat luar desa yang menggarap lahan hutan negara di Desa Tanjung Aur II (S1, S2, S3, T1). (<i>Establish the Village Forest manager institution that consists of the villagers and outside community which encroach state forest land in the Village of Tanjung Aur II (S1, S2, S3, T1)</i>)
<ol style="list-style-type: none"> 2. Terbatasnya dana fasilitasi program yang dianggarkan oleh stakeholder terkait (<i>Limited of funds to facilitation programs that budgeted by stakeholders</i>) 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Meminta pihak terkait untuk melakukan sosialisasi mengenai program Hutan Desa kepada masyarakat desa dan masyarakat penggarap lahan hutan (W3, W4, T1, T2, T3, T4). (<i>Ask stakeholders to conduct socialization about Village Forest to village community and the community of forest land encroachers (W3, W4, T1, T2, T3, T4)</i>) 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Menetapkan kewajiban lembaga pengelola untuk memberikan kontribusi/kompensasi ke kas desa/kas lembaga desa yang sebangunnya dipergunakan untuk mendukung pembiayaan fasilitas program secara mandiri (S2, S3, T2). (<i>Set the liability of manager institutions to contribute or give compensation to the village cash or to the cash of village institutions that in part used to support financing program facilitation independently (S2, S3, T2)</i>)
<ol style="list-style-type: none"> 3. Terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki stakeholder terkait yang dapat memfasilitasi Hutan Desa (<i>Limited human resources / Village Forest facilitator</i>) 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Mengoptimalkan fasilitasi program hingga ke desa (W3, T2, T3, T4). (<i>Ask stakeholders related to enhance coordination and optimize the facilitation of program until to the village level (W3, T2, T3, T4)</i>) 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Menetapkan kewajiban lembaga pengelola untuk mencegah dan melindungi kawasan hutan negara yang termasuk dalam areal kerja hutan desa dan areal di sekitarnya dari berbagai ancaman perambahan dan perusakan hutan (S1, S2, S3, T1, T2). (<i>Set the liability of manager institutions to prevent and protect the state forest area is included in the working area of the Village Forest and the surrounding area from various threats of encroachment and destruction of forests (S1, S2, S3, T1, T2)</i>)
<ol style="list-style-type: none"> 4. Koordinasi antar stakeholder terkait kurang berjalan baik (<i>Lack of coordination between relevant stakeholders</i>) 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Stakeholder terkait harus meningkatkan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan mengenai Hutan Desa untuk Fasilitator, Pendamping, dan Lembaga Pengelola Hutan Desa (W3, W4, T3, T4). (<i>Related stakeholders should enhance the capacity of human resources through education and training about Village Forest to Facilitator, Companion, and the Manager Institution of the Village Forest (W3, W4, T3, T4)</i>) 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Mencari dan meminta dukungan dari stakeholder terkait ataupun pihak-pihak lainnya yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk melakukan fasilitasi dan pendampingan (S2, S3, T3, T4). (<i>Seeking and asking for support from relevant stakeholders or other parties who had the capacity and capability to undertake facilitation and assistance (S2, S3, T3, T4)</i>)
	<ol style="list-style-type: none"> 5. Membiarkan pola budidaya yang telah ada dan diterapkan oleh penggarap lahan hutan negara saat ini (W2, T1). (<i>Let the existing cultivation pattern and applied by encroachers which currently on state forest land now (W2, T1)</i>) 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Memasukkan rencana implementasi dan pengembangan Hutan Desa ke dalam RPJMDes dan Rencana Tahapan Desa Tanjung Aur II (S1, S2, S3, T1, T2). (<i>Enter the plan of implementation and development of the Village Forest into the Medium Term Development Plans and Annual Plans of the Village of Tanjung Aur II (S1, S2, S3, T1, T2)</i>)

Sumber (Source): Pengolahan data primer dan sekunder (Processed from primary and secondary data)

Lampiran 4. Prioritas Strategi Implementasi Program Hutan Desa di Desa Tanjung Aur II
Appendix 4. Priority of Implementation Strategy of Village Forest Program in Tanjung Aur II

Faktor kunci (Key factors)	Bobot (Weight)	Strategi (Strategy)									
		1		2		3		4		5	
		AS	TAS	AS	TAS	AS	TAS	AS	TAS	AS	TAS
Faktor internal (Internal factors)											
Kekuatan/Strengths (S)											
a. Keberadaan lahan hutan negara (HL dan HPT) dengan luas yang memadai dalam wilayah desa <i>(The existence of state forests (protected forest and limited production forest) with an sufficient area in rural areas)</i>	0,173	2	0,347	1	0,173	4	0,694	1	0,173	2	0,347
b. Masyarakat desa memiliki modal sosial yang kuat dalam bentuk kepercayaan (trust) terhadap sesama, pemerintah, dan pihak lain <i>(Villagers have strong social capital in the form of trust to others, governments , and other parties)</i>	0,152	4	0,606	3	0,455	3	0,455	4	0,606	4	0,606
c. Dukungan aparaturnya desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat penggarap lahan hutan negara <i>(Support of village officials, community leaders, and cultivators of state forest land)</i>	0,182	4	0,729	4	0,729	4	0,729	4	0,729	4	0,729
Kelemahan/Weaknesses (W)											
d. Batas wilayah administrasi desa belum definitif <i>(Administrative boundaries of village have not been definitively)</i>	0,165	2	0,329	1	0,165	2	0,329	1	0,165	3	0,494
e. Komoditi utama yang dibudi dayakan di lahan hutan negara bukan tanaman kehutanan (pohon penghasil kayu) <i>(The main commodities grown in state forest lands not forestry plants (woody))</i>	0,103	1	0,103	1	0,103	2	0,207	1	0,103	1	0,103
f. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap program Hutan Desa <i>(Lack of knowledge and understanding of the community against the Village Forest program)</i>	0,122	1	0,122	1	0,122	2	0,245	3	0,367	2	0,245
g. Tidak ada norma/aturan dalam pengelolaan sumber daya alam (termasuk hutan) yang berlaku secara khusus di desa setempat <i>(No norms/ rules in the management of natural resources (including forests) which applies specifically in the local village)</i>	0,102	1	0,102	1	0,102	4	0,408	2	0,204	1	0,102
Faktor eksternal (External factors)											
Peluang/Opportunities (O)											
a. Kemudahan aksesibilitas menuju kawasan hutan negara <i>(Ease of accessibility to the area of state forest)</i>	0,123	1	0,123	1	0,123	2	0,246	2	0,246	1	0,123
b. Ketergantungan masyarakat yang tinggi terhadap lahan hutan negara sebagai lahan usaha pertanian/perkebunan <i>(High dependence of community on state forest lands as the land of farming / plantation)</i>	0,127	3	0,382	4	0,509	3	0,382	2	0,254	2	0,254
c. Penerapan pola agroforestri oleh masyarakat penggarap lahan hutan negara <i>(Application of agroforestry by cultivators community on state forest land)</i>	0,090	2	0,181	1	0,090	2	0,181	2	0,181	1	0,090
d. Dukungan stakeholder lainnya sesuai kapasitas dan peranannya masing-masing <i>(Support of other stakeholders according to the capacity and role of each)</i>	0,129	3	0,388	1	0,129	2	0,259	4	0,518	2	0,259
Ancaman/Threats (T)											
e. Peningkatan perambahan kawasan hutan negara oleh masyarakat dari luar desa setempat <i>(Increased state forest land encroachment by people from outside the local village)</i>	0,136	4	0,545	2	0,272	4	0,545	2	0,272	3	0,408
f. Terbatasnya dana fasilitasi program yang dianggarkan oleh stakeholder terkait <i>(Limited of funds to facilitation programs that budgeted by stakeholders)</i>	0,129	1	0,129	4	0,518	1	0,129	4	0,518	4	0,518
g. Terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki stakeholder terkait yang dapat memfasilitasi Hutan Desa <i>(Limited human resources / Village Forest facilitator)</i>	0,132	1	0,132	2	0,263	1	0,132	4	0,527	1	0,132
h. Koordinasi antar stakeholder terkait kurang berjalan baik <i>(Lack of coordination between relevant stakeholders)</i>	0,133	1	0,133	1	0,133	1	0,133	4	0,531	1	0,133
Total skor ketertarikan <i>(Amount of attractiveness score (TAS))</i>		4,352		3,888		5,073		5,395		4,544	
Prioritas strategi terpilih <i>(Selected strategic priorities)</i>		IV		V		II		I		III	

Sumber (Source): Pengolahan data primer dan sekunder (Processed from primary and secondary data)